

**Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan pada  
Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan**

Oleh:

Astuti<sup>1</sup>, Heriyani Agustina<sup>2</sup>, I Machmud<sup>3</sup>  
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon<sup>1,2,3</sup>  
Email: heriyani.agustin@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The author poured this essay writing with the title "Implementation of Road Construction Policy in Kuningan Bina Marga Office. The problems that arise whether the implementation of road development policy in the Department of Highways District Kuningan not optimal.*

*The objectives of this research are: (1) how Implementation of Road Construction Policy in Bina Marga Office of Kuningan Regency, (2) what factors influence the policy of Road Construction in Bina Marga Office of Kuningan Regency, (3) any obstacles faced in Implementation of Policy Implementation of Road Development at Bina Marga Office of Kuningan Regency. This study used qualitative research methods. Qualitative research method is the method used in natural object condition. The theory used in this research is George Edward III theory, which are: (1) communication, (2) sources, (3) disposition or attitude, (4) bureaucracy structure.*

*The result shows that the Implementation of Road Construction Policy in Bina Marga Office of Kuningan Regency has not been optimally caused by many problems due to many obstacles such as delay of road construction fund delayed and can mempperlambat the process of development of the road, the attitude of the executing officers less responsible and less knowledge of the executing officers on the field so that road construction is not optimal yet.*

## 1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4444 yang menyatakan kebijakan pembangunan jalan ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan pada Bab 1 pasal 1 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Biasanya jalan ini digunakan untuk kendaraan bermotor, di gunakan untuk kendaraan pribadi, digunakan untuk kendaraan umum dan digunakan oleh masyarakat umum. Jalan raya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 26 tahun 2011 bagian ke 4

sistem prasarana Utama yaitu Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Dengan adanya jalan raya, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu, jalan raya juga mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya.

Tujuan pembangunan jalan raya pada umumnya dimaksudkan sebagai prasarana diantaranya agar kendaraan angkutan dapat mengangkut penumpang atau barang langsung ke tempat tujuan dan kota-kota yang dilalui atau yang dituju serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat ditekan. Adapun fungsi jalan pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 pada bab II bagian ketiga Paragraf 1 pasal 9 menyatakan bahwa berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan pada Bab 1 pasal 1 menyatakan pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pembangunan jalan itu sendiri merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber potensi daerah adalah melalui pembangunan jalan. Hal ini dikarenakan fungsi jalan sebagai prasarana transportasi dapat mempermudah pergerakan manusia, jasa, dan barang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan jalan juga dapat menciptakan keseimbangan dan pemerataan antar daerah.

Renstra Kementerian mengemukakan pembangunan jalan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang terdiri dari pemerintah sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pembuat kebijakan (*policy maker*), pengusaha/ kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap infrastruktur jalan haruslah bersama-sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun tersebut.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur masalah pembangunan jalan. Dalam implementasi di lapangan peraturan dan pedoman tersebut telah dimasukkan dalam pasal syarat-syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan pasal-pasal tersebut.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang sudah dilakukan masih belum optimal atau tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kurangnya akses penunjang transportasi masyarakat, kondisi jalan yang sudah rusak belum dikelola dengan baik.
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembangunan jalan
  - c. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas
  - d. Kurang efektifitasnya koordinasi antar dinas–dinas yang terkait.
- Pembangunan jalan yang dilakukan pada Dinas Bina Maraga Kabupaten Kuningan?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan?

## 2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan presepsi latar belakang dan fokus penelitian diatas dapat di rumuskan *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum optimal.

## 3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah diatas maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan jalan yang dilakukan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kebijakan

## 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.

## 5. Kegunaan Penelitian

### 5.1 Kegunaan Teoritis

1. Agar dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penyusun pelaksana Implementasi Kebijakan pada

Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pelaksana Implementasi Kebijakan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.
3. Diharapkan dapat mengetahui tata cara Prosedur Mekanisme Implementasi Kebijakan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.

### 5.2 Kegunaan Praktis

1. Berperan serta meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pelaksana Implementasi Kebijakan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.
2. Diharapkan pelaksanaan proses kegiatan pembangunan jalan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.

### 6. Kerangka Pemikiran

Menurut *Ripley dan Franklin* berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). lebih lanjut lagi implementasi menurut mereka mencakup banyak kegiatan yaitu:

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang di butuhkan agar implementasi berjalan dengan lancar
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Menurut Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Menurut Suparmoko "Pembangunan jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, penggunaannya diatur oleh undang-undang angkutan".

Menurut George C. Edwards implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik.

Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan. Jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Menurut *Edwards* ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Kecenderungan-kecenderungan
4. Birokrasi

Keempat faktor tersebut di jadikan teori dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis akan mencoba menguraikannya lebih rinci.

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasnya.

- a) Transmisi.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan.

b) Kejelasan.

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan di implementasikan sebagaimana yang di inginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus di terima oleh para pelaksana kebijakam, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

c) Konsistensi.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ini berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas

2. Sumber-sumber

a. Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus di ingat adalah bawah jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang ke dua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang di lakukan dan bagai mana mereka harus melakukannya.

Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang di lakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang di rencanakan tindakan berhasil.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

##### a. Pengaruh Struktur

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu sari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP).

##### b. Kebijakan-kebijakan yang

##### Cenderung Menghadapi Masalah

Tipe-tipe kebijakan ini di dasarkan pada karakteristik masing-masing kebijakan.

#### 1. Kebijakan-kebijakan baru

Beberapa alasan yang dapat diajukan untuk memperkuat posisi ini:

1. Saluran-saluran komunikasi yang maju belum di bangun

2. Tujuan-tujuan yang di tetapkan seringkali tidak jelas

3. Selain tujuan-tujuan yang tidak jelas tipe kebijakan yang baru cenderung juga menghadapi langkanya sumber-sumber

4. Program-program baru mempunyai kemungkinan besar menghadapi langkanya sumber-sumber.

5. Jika suatu program baru di pandang tidak konsisten dengan misi utama badan pelaksana saat ini, program tersebut akan cenderung mendapat prioritas dan sumber yang rendah dari para pelaksana.

6. Program-proram baru seringkali membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara-cara yang telah lazim di lakukan.

2. Kebijakan yang didesentralisasikan.

3. Kebijakan kontroversial

4. Kebijakan-kebijakan yang kompleks

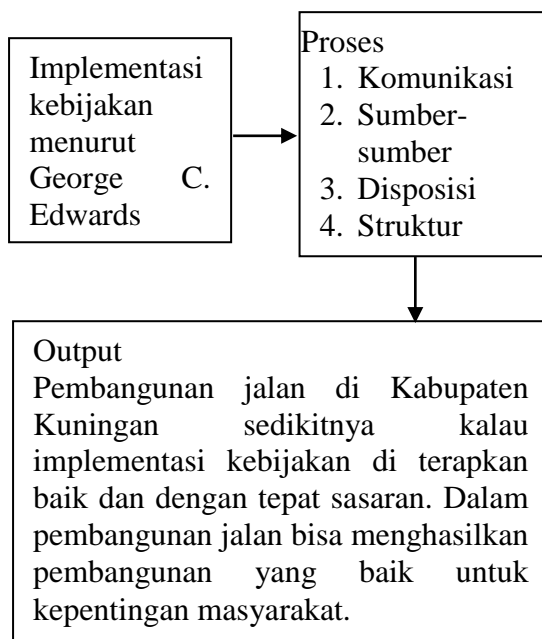
5. Kebijakan yang berhubungan dengan krisis

6. Kebijakan yang di tetapkan oleh pengadilan

- c. Prospek untuk memperbaiki masalah implementasi



1. Dalam mengusulkan langkah-langkah perbaikan harus di pahami terlebih dahulu hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan dan mengapa hambatan-hambatan itu muncul
2. Perlu mengubah keadaan-keadaan yang menghasilkan faktor-faktor ini



**Gambar 1.2** Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan

## 7. Gambaran Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan

Bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, telah dibentuk Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan. Dalam rangka pelaksanaan

Pasal 25 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Bina Marga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 tahun 2008 tentang pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Bina Marga.

## 8. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Bina Marga berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian.
- 3) Bidang Program, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan;
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
  1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- 5) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan Jalan;
  2. Seksi Pembangunan Jembatan

- 6) Bidang Peralatan dan Perbengkelan, membawahkan:
1. Seksi Peralatan;
  2. Seksi Perbengkelan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

## **9. Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan**

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan“. Berdasarkan penelitian serta hasil wawancara dengan beberapa informan terkait, penulis mendapatkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan jalan di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk menyediakan sarana transportasi untuk masyarakat berupa jalan, yang sesuai dengan visi dan misi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan pada kurun waktu tertentu di masa yang akan datang yaitu dari tahun 2009-2015.

Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4444 yang

menyatakan kebijakan pembangunan jalan ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan pada Bab 1 pasal 1 menyatakan pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 26 tahun 2011 bagian ke 4 sistem prasarana Utama yaitu Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Pembangunan jalan itu sendiri adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar

ini mempunyai ciri-ciri digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum. Kesimpulan menurut penulis setelah melihat kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa implementasi kebijakan pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan belum optimal salah satu contohnya dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk transportasi kendaraan, dan masyarakat umum masih banyak jalan yang rusak dan berlubang sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan. Padahal pembangunan jalan ini sudah termasuk visi dalam jangka waktu yang panjang 2009–2013, sehingga ini semua sangat dibutuhkan peningkata kerja aparat pelaksana. komunikasi, sumber daya manusia.

### 9.1 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Komunikasi menurut George C. Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa

yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterpkan dalam masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melauai beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah yang jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureauacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/

mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak ditetapkan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan pelaksana di lapangan.

Kesimpulan penulis bahwa komunikasi itu sangat penting berpengaruh untuk mengukur kinerja implementasi yang menegaskan standar dan sasaran yang akan dicapai oleh para pelaksana kebijakan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan demikian dimensi komunikasi akan dijabarkan kedalam bentuk parameter penelitian yakni:

1. Komunikasi Koordinasi
2. Komunikasi Sosialisasi
3. Komunikasi Aparat Pelaksana

### 9.1.1 komunikasi Koordinasi

Dalam komunikasi terdapat tahap komunikasi antar koordinasi, yang dimaksud dengan koordinasi yaitu proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing kerja keras tetapi kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. Koordinasi penting dalam suatu organisasi karena organisasi mempunyai karakteristik-karakteristik yang mempunyai struktur bagian dengan bagian lain. Cara untuk mewujudkan koordinasi dengan baik yaitu adanya kontak langsung dari mereka yang kegiatannya harus dikoordinasikan.

Hasil wawancara Bapak Arif Hermawan, ST Kasi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Kabupaten untuk mengetahui bagaimana komunikasi koordinasi sebagai berikut:

Bapak Arif Hermawan ST selaku Kasi Pembangunan Jalan menyatakan:

“Komunikasi antar koordinasi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan dengan instansi-instansi atau dinas-dinas yang lain, itu ada tapi jarang dilakukan, tetapi untuk pembangunan jalan tersebut hak sepenuhnya oleh Dinas Bina Marga

Kabupaten Kuningan atau dinas kita sendiri”.

Kesimpulan penulis bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan komunikasi itu memang hanya sepihak dari dinas itu sendiri, koordinasi antar instansi-intansi itu ada tetapi tidak selalu dilakukan.

### 9.1.2 Komunikasi Sosialisasi

Komunikasi sosialisasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi sosialisasi hubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok berjalan dengan baik tidak ada kecanggungan diantara individu dan kelompok tersebut. Pengertian sosialisasi itu sendiri merupakan sebuah proses yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, nilai sosial.

Hasil wawancara Bapak Arif Hermawan, ST Kasi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Kabupaten untuk mengetahui bagaimana komunikasi sosialisasi sebagai berikut:

Bapak Arif Hermawan ST selaku Kasi Pembangunan Jalan menyatakan:

“sosialisasi di sini ada tetapi individu-individu dan kelompok-kelompok kurang berjalan dengan

baik, banyak individu-individu yang sedikit tidak peduli”.

Kesimpulan menurut penulis bahwa dalam komunikasi sosialisasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi sosialisasi hubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok berjalan dengan baik. Pada dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan kurang berjalan dengan baik. Banyak individu-individu yang tidak peduli akan sosialisasi.

### 9.1.3 Komunikasi Aparat Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian publik. Pada Dinas Bina Marga Kabupaten komunikasi aparat pelaksanaan sangat penting dan sangat mempengaruhi suatu keberhasilan tugasnya tersebut.

Hasil wawancara Ibu Juju Jumiati, S.IP selaku Kasubag Kepegawaian Dinas Bina Marga Kabupaten untuk mengetahui bagaimana komunikasi aparat pelaksana sebagai berikut:

Ibu Juju Jumiati, S.IP selaku Kasubag Kepegawaian menyatakan:

“Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan ini komunikasi para aparat pelaksana itu ada, tetapi mereka tidak

sering berkomunikasi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, karena mungkin mereka sibuk dengan pekerjaannya.”

Kesimpulan penulis mengenai komunikasi aparat pelaksana Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan komunikasi antara aparat pelaksana itu ada tetapi jarang berkomunikasi antara para pegawai.

## 9.2 Sumber –sumber

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik dan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Indikator sumberdaya-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen menurut George C. Edward III, yaitu:

*a. Staf;* sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seringkali terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memidai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

*b. Informasi;* dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksana kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

*c. Wewenang,* pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

*d. Fasilitas,* fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Kesimpulan menurut penulis bahwa sumber-sumber kebijakan merupakan segala sumber yang dapat mendukung suatu keberhasilan. Jika para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi bila kebijakan tidak di dukung dengan sumber-sumber kebijakan itu tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber daya ini mencakup sumber dana, proses administrasi dan sumber daya manusia.

#### **10. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuningan**

Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang di lakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah dan dikerjakan oleh pemerintah itu untuk mewujudkan suatu tujuan yang dicapai. Kemudian suatu kebijakan itu harus

dilaksanakan dalam implementasi kebijakan tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Adapun hambatan-hambatan keseluruhan yang dihadapi di dalam “implementasi kebijakan pembangunan jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan” melihat kondisi dilapangan sebagai berikut:

1. Keterlambatan dana yang membuat terhambatnya pembangunan jalan sehingga pembangunan itu ditunda dan menunggu datangnya dana.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya.

#### **11. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok dalam proses kebijakan publik dan suatu program kebijakan publik untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan atas Pembangunan Jalan yang dikerjakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan hasil kerja yang maksimal agar pembangunan dapat berjalan secara optimal.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan jalan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. komunikasi itu sangat penting berpengaruh untuk mengukur kinerja implementasi yang menegaskan standar dan sasaran yang akan dicapai oleh para pelaksana kebijakan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
2. Menurut penulis bahwa sumber-sumber kebijakan merupakan segala sumber yang dapat mendukung suatu keberhasilan. Jika para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi bila kebijakan tidak didukung dengan sumber-sumber kebijakan itu tidak akan berjalan dengan efektif dan

efisien. Sumber daya ini mencakup sumber dana, proses administrasi dan sumber daya manusia.

3. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi.
4. Bahwa struktur birokrasi aparat pelaksana pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu sari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (standard operating procedures, SOP). Dan yang berpengaruh pada implementasi pelaksanaan fragmentasi organisasi.
3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jalan yaitu:
  - a. Keterlambatan dana yang membuat terhambatnya pembangunan jalan sehingga



pembangunan itu ditunda dan menunggu datangnya dana.

- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya.

## 12. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Kabupaten Kuningan penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Para pembuat kebijakan serta pelaksanaan kebijakan harus mempunyai Sumber Daya Manusia yang Kompeten di bidangnya
- b. Harus sering di adakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdul Wahab, Solichin, Dr., M.A 2004.

*Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: PT. bumi Aksara.

Agustina, Leo, S.Sos., M.Si. 2014.

*Dasar – dasar Kebijakan publik.* Bandung: Cv. Alfabeta

Lexy J, Moleong, Prof. Dr.M.A. 2012

*Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Waluyo, S.Sos, M.Si. 2008 *Manajemen*

*Publik* Jakarta: Mandar maju.

Winarno, Budi, Prof. Dr. M.A. 2007

*Kebijakan Publik (Teori dan Proses).* Yogyakarta: Madpress